



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



dinsos_temanggung



dinsos.temanggungkab.go.id



(0293) 491129

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 21 Agustus 2026

Koordinator
Bidang PPMP



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,



DANI YULIAWATI, S.E
NIP. 198007062003122005

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

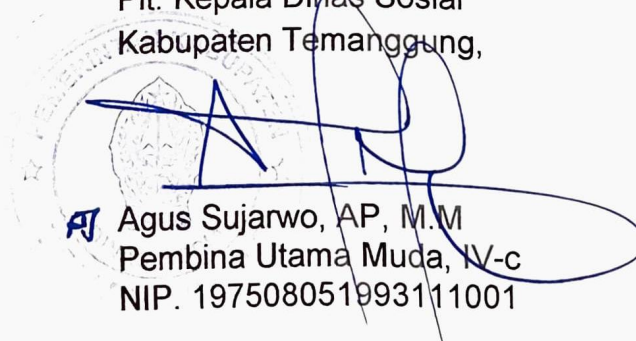
Penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Dinas Sosial Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung,



AJ Agus Sujarwo, AP, M.M
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 197508051993111001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 6

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 6

 A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program 7

 B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan 8

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 18

 3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 18

 3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 23

BAB IV PENUTUP..... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 6

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 7

Tabel 2. 3 Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 Dinas Sosial 9

Tabel 3.1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2026 18

Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Perubahan Renja Tahun 2026 dengan pagu APBD Tahun 2026.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana DAU;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;

- e. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
- f. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- g. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan rancangan awal;
- 3) Penyusunan rancangan;
- 4) Perumusan rancangan akhir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/ Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Dinas Sosial disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Program Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2026 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja
				Target 2026	Realisasi s.d TW II 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
A	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial. rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	84,5	99,84	100	Sangat Tinggi
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	69	99,68	100	Sangat Tinggi
1	Program Pemberdayaan Sos						
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan. Keluarga. Masyarakat. dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Rehabilitasi Sosial						
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase Warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	Sangat Tinggi

		Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		%				
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	0	0	Sangat Rendah
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	%	86	98,10	100	Sangat Tinggi
5	Program Penanganan Bencana						Sangat Tinggi
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						
	Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : IKPD Dinas Sosial Tahun 2026

Berdasarkan tabel 2.2 diatas hasil evaluasi pada kinerja IKUPD dan indikator program Dinas Sosial, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:

1. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal adalah belum adanya Penerima Manfaat yang memerlukan layanan tersebut.
2. Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah belum terlaksananya verval DKD 2026 karena akan dilaksanakan pada semester I 2026. Pemutakhiran DKD dilaksanakan setiap 6 bulan sekali

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan Dinas Sosial disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3

Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 Dinas Sosial

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026 (Rp)	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 2 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	2	3	4	5	6	7 (K)	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.425.181.444	17.697.568.111					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.425.181.444	17.697.568.111	4.810.084.828				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.202.669	5.883.208.383	2.785.321.313				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	4.591.708.597	2.386.202.853	100			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.120.259	4.591.708.597	2.386.202.853	41	41	100	Sangat Tinggi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.666.800	94.683.460	29.461.100				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.500.000	2.924.000	20	10	50	Sangat Rendah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.233.500	12	6	50	Sangat Rendah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.500.000	2.112.600	12	6	50	Sangat Rendah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	31.350.000	7.455.000	36	10	27,78	Sangat Rendah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.666.800	30.083.460	12.736.000	25	10	40	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.467.840	1.000.965.945	333.338.460	100			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.700.000	1.359.000	12	6	50	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.350.000	72.532.500	33.809.537	12	6	50	Sangat Rendah
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	8,550,000	480.000	4		0	Sangat Rendah

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	8.550.000	297.689.923	12	6	50	Sangat Rendah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.947.770	195.850.381	36.318.900	100	0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		142.500.000	34.578.900	90	45	50	Sangat Rendah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.947.770	53.350.381	4.140.000	6	3	50	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	310.000.000	165.000.000	6.997.500		0		
	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial					100	100	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	koordinasi dan sinkronasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang			0	7	0		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000	165.000.000	6.997.500		0		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	235.000.000	150.000.000	0	5	4	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			0	30	0	0	Sangat Rendah
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	5.000.000	1.200.000	5	6	100	Sangat Tinggi
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	5.000.000	3.177.500	50	70	100	Sangat Tinggi
	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	10.000.000	5.000.000	2.620.000	12	9	75	Sedang
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							

	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	12.000.000	7.500.000		100	100		
	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	12.000.000	7.500.000	75.000	100	100		
	<i>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>			100				
	<i>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</i>	12.000.000	7.500.000	75.000	5	2	40	Sangat Rendah
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.328.000.000	924.750.000	262.687.165	100			
	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	1.328.000.000	576.500.000	243.095.200	100			
	<i>Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</i>							
	<i>Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</i>							
	<i>Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</i>							
	<i>Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti</i>							
	<i>Penyediaan Permakanan</i>	650.000.000	2.000.000	70.000	20	0	0	Sangat Rendah
	<i>Penyediaan Sandang</i>	20.000.000	5.000.000	150.000	130	0	0	Sangat Rendah

	Penyediaan Alat Bantu	35.000.000	10.000.000	8.930.000	5	5	0	Sangat Rendah
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	5.000.000	1.495.000	5	3	60	Sangat Rendah
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000	5.000.000	2.521.000	40	24	60	Sangat Rendah
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	25.000.000	11.186.200	50	33	66	Rendah
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	2.500.000	662.500	3	2	67	Rendah
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000	8.000.000	2.805.000	100	281	100	Sangat Tinggi
	Pemberian Layanan Kedaruratan	528.000.000	504.000.000	211.256.500	248	125	50	Sangat Rendah
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	4.000.000	1.632.500	10	2	20	Sangat Rendah
	Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	5.000.000	2.386.500	5	30	100	Sangat Tinggi
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	1.000.000	444.500	5	26	100	Sangat Tinggi
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		348.250.000	19.591.965	100	100		
	Penyediaan Permakanan	-	348.250.000	19.591.965	240	219	91	Sangat Tinggi
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	20.319.578.775	10.564.109.728	1.910.400	100			
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	814.131.000	806.631.000	1.910.400	100			
	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial							
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	799.131.000	0	267	0	0	Sangat Rendah
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	7.500.000	1.910.400	15	10	67	Sedang
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.505.447.775	9.757.478.728	1.710.332.450-	100			

	<i>Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota</i>							
	<i>Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota</i>							
	<i>Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan</i>							
	<i>Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</i>							
	<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	70.003.475	35.001.738	2.483.250	392,920	0	0	<i>Sangat Rendah</i>
	<i>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>	810.000.000	702.500.000	4.587.500	60	0	0	<i>Sangat Rendah</i>
	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	18.615.444.300	9.014.976.990	1.701.575.850	114,249	0	0	<i>Sangat Rendah</i>
	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	5.000.000	1.685.850	75754	64,400	85	<i>Tinggi</i>
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	174.000.000	87.000.000	8.636.500 -	100			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.000.000	47.000.000	8.636.500 -	100			
	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota</i>							
	<i>Penyediaan Makanan</i>	45.000.000	22.500.000	7.427.200	100	174	100	<i>Sangat Tinggi</i>
	<i>Penyediaan Sandang</i>	40.000.000	20.000.000	0	100	174	100	<i>Sangat Tinggi</i>
	<i>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</i>	3.000.000	1.500.000	0	30	25	83	<i>Tinggi</i>
	<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	2.000.000	1.000.000	73.800	30	174	100	<i>Sangat Tinggi</i>
	<i>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</i>	4.000.000	2.000.000	1.135.500	10	25	100	<i>Sangat Tinggi</i>
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	40.000.000		60			
	<i>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</i>	80.000.000	40.000.000	0	60	40	66,67	<i>Sedang</i>
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79.400.000	66.000.000	31.430.000	100			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.400.000	66.000.000	31.430.000	100	100		

	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.400.000	66.000.000	31.430.000	250	250	100	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan dari tabel di atas , diketahui bahwa:

Terdapat 31 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang di rencanakan antara lain :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12. Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota
13. Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
14. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
15. Penyediaan Permakanan
16. Penyediaan Sandang
17. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
18. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
19. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
20. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
21. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
22. Pemberian Layanan Kedaruratan
23. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

24. Penyediaan Permakanan
25. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
26. Rujukan Anak-Anak Terlantar
27. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
28. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
29. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
30. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
31. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
32. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Adapun kondisi ini di sebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Terkendala keterlambatan proses pengadaan (pengadaan apa saja dirinci)
- b. terkendala pada proses pengajuan anggaran melalui Uang Persediaan (UP) dan belanja yang melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang belum di tetapkan dalam Peraturan Bupati.
- c. Realisasi sebagian besar kegiatan pada Triwulan II belum mencapai target karena kebutuhan operasional pada awal tahun masih rendah, belum adanya kerusakan atau permintaan yang memerlukan tindak lanjut, serta dukungan anggaran yang belum dapat direalisasikan
- d. Terkait dengan fasilitasi pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) masih dilakukan pemetaan kesiapan desa/kelurahan, identifikasi wilayah yang memerlukan pembinaan, serta penyusunan strategi pengembangan sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sementara itu, pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial (SLRT) tetap berjalan optimal dengan pelayanan konsultasi, pengaduan, dan rujukan setiap hari kerja, meskipun capaian pelaporan masih menyesuaikan target tahunan sehingga baru terealisasi tiga laporan pada Triwulan II.
- e. sebagian besar realisasi kegiatan pada Triwulan II belum mencapai target karena pelaksanaannya sangat bergantung pada adanya laporan kasus,
- f. Pada Kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar realisasi kegiatan belum mencapai target karena sedang menunggu proses verifikasi oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS).

Dampak/ Implikasi dari realisasi program/kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya dari yang direncanakan antara lain

- a. belum optimalnya capaian indikator kinerja serta rendahnya penyerapan anggaran, meskipun tidak mengganggu kelancaran operasional maupun pelayanan karena kegiatan tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- b. belum optimalnya capaian indikator kinerja administrasi, namun tidak mengurangi kualitas maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. belum optimalnya capaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran
- d. tertundanya pencairan bantuan permakanan panti

Upaya Tindak Lanjut dari realisasi program/kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya dari yang direncanakan

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai rencana;
- b. memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait;
- c. melakukan verifikasi ulang data calon penerima bantuan permakanan.

Dari tabel 2.3 terdapat 3 subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang di rencanakan antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Alat Bantu;
3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Adapun kondisi ini di sebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya pembayaran gaji ASN.
- b. Adanya permintaan alat bantu di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sehingga Dinas Sosial proaktif meminta dukungan bantuan alat bantu ke Kementerian Sosial (Sentra Terpadu Kartini) sehingga realisasi alat bantu di Triwulan I memenuhi target.
- c. Realisasi fasilitasi pemeliharaan Taman Makam Pahlawan target kinerja telah tercapai karena pemeliharaan dilaksanakan oleh petugas pemelihara rutin seminggu 3 kali setiap bulan di TMP Prayudha Mudal dan Makam Pahlawan Bambang Sugeng Kranggan, kegiatan ziarah makam juga telah terlaksana dengan baik.

Dampak dari realisasi program/kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya dari yang direncanakan adalah :

- a. mempercepat pemulihan fungsi sosial dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas serta lansia, sehingga mereka dapat beraktivitas dan produktif lebih cepat dari yang dijadwalkan;
- b. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara rutin memastikan terpeliharanya makam-makam yang berada di TMP, selain dari kebersihan juga apabila terjadi kerusakan oleh sebab-sebab alam dapat langsung ditindaklanjuti.

Upaya Tindak Lanjut realisasi program/kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya dari yang direncanakan adalah:

- a. Menyusun kebijakan monitoring dan evaluasi pasca-distribusi untuk memastikan bahwa seluruh alat bantu yang bersumber dari Kementerian Sosial tersebut tepat sasaran, dimanfaatkan dengan baik;
- b. monitoring secara berkala serta memastikan sarana dan prasarana pemeliharaan TMP terpelihara dengan baik.

Terdapat 6 sub kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang di rencanakan antara lain :

1. Pemberian Layanan Rujukan
2. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Makanan
4. Penyediaan Sandang
5. Pelayanan Dukungan Psikososial
6. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Adapun realisasi yang melampaui target disebabkan oleh banyaknya PPKS yang membutuhkan pelayanan serta adanya dukungan dari stake holder terkait dalam pelayanan terhadap PPKS. Dampak yang ditimbulkan adalah hak-hak dasar masyarakat terpenuhi sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Upaya Tindak Lanjut untuk mengoptimalkan fungsi sosial adalah dengan melakukan koordinasi lintas sektoral

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Dinas Sosial Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.425.181.444	17.702.308.111	18.162.689.671	-9.262.491.773	460.381.560	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	27.425.181.444	17.702.308.111	18.162.689.671	-9.262.491.773	460.381.560	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.202.669	5.882.948.383,00	6.555.142.743,00	1.352.940.074	672.194.360	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.500.120.259	4.591.448.597,00	4.591.708.597,00	91.588.338,00	260.000	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.120.259	4.591.448.597,00	4.591.708.597,00	91.588.338,00	260.000	
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.666.800	94.683.460,00	150.683.460,00	51.016.660,00	56.000.000	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-500.000	
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.250.000	14.250.000	-750.000	0	
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.500.000	10.500.000	500.000	1.000.000	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	31.350.000	46.350.000	13.350.000	15.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.666.800	30.083.460	70.083.460	38.416.660	40.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600,000,000	600,000,000	600,000,000	
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600,000,000	600,000,000	600,000,000	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.467.840	1.000.965.945	930.900.305	554.432.465	-70.065.640	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.700.000	5.700.000	-300.000	0	
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.350.000	72.532.500	72.532.500	-3.817.500	0	
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	8.550.000	17.550.000	8.550.000	9.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.117.840	914.183.445	835.117.805	549.999.965	-79.065.640	pergeseran antar rekening dan tambahan upah P3K gaji ke 13, gaji Desember, 71934360
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.947.770	195.850.381	281.850.381	55.902.611	86.000.000	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	142.500.000	228.500.000	228.500.000	86.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.947.770	53.350.381,00	53.350.381,00	-22.597.389,00	0	pergeseran antar rekening
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	310.000.000	165.000.000	169.000.000	141.000.000	4.000.000	
1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	-	-	5.000.000	-	
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	5.000.000	-	-	5.000.000	-	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
	Pengumpulan Uang atau Barang						
2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	305.000.000	170.000.000	119.000.000	-186.000.000	-51.000.000	
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	235.000.000	150.000.000	84.000.000	-151.000.000	-66.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
b.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000			10.000.000	-	
c.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	5.000.000	5.000.000	-10.000.000	0	
d.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	10.000.000	25.000.000	10.000.000	15.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
3.	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0	
a.	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	0	0	-20.000.000	0	
C.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	12.000.000	7.500.000	7.500.000	-4.500.000	0	
1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12.000.000	7.500.000	7.500.000	-4.500.000	0	
a.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12.000.000	7.500.000	7.500.000	-4.500.000	0	Penyesuaian Target

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
D.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.328.000.000	924.750.000	869.750.000	-458.250.000	-55.000.000	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.328.000.000	576.500.000	581.500.000	746.500.000	5.000.000	
a.	Penyediaan Permakanan	650.000.000	576.500.000	581.500.000	-746.500.000	5.000.000	Penyesuaian Target
b.	Penyediaan Sandang	20.000.000	2.000.000	2.000.000	-648.000.000	0	Penyesuaian Target
c.	Penyediaan Alat Bantu	35.000.000	5.000.000	5.000.000	-15.000.000	0	Penyesuaian Target
d.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-25.000.000	0	pergeseran antar rekening
e.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.000.000	5.000.000	10.000.000	0	5.000.000	penyesuaian target dan pergeseran antar rekening
f.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	Penyesuaian Target
g.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0	Penyesuaian Target
h.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.000.000	8.000.000	8.000.000	-2.000.000	0	
i.	Pemberian Layanan Kedaruratan	528.000.000	504.000.000	504.000.000	-24.000.000	0	Penyesuaian Target
j.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	4.000.000	4.000.000	-6.000.000	0	Penyesuaian Target
k.	Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	5.000.000	5.000.000	-10.000.000	0	Penyesuaian Target
l.	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.000.000	0	Penyesuaian Anggaran
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		348.250.000	288.250.000	288.250.000	-60.000.000	

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
a.	Penyediaan Permakanan	-	348.250.000	288.250.000	288.250.000	-60.000.000	pergeseran antar sub kegiatan
E.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	20.319.578.775	10.452.296.928	-9.867.281.847	-111.812.800	10.452.296.928	
1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	814.131.000	806.631.000	806.631.000	-7.500.000	0	
a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	799.131.000	799.131.000	799.131.000	0	0	
b.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	15.000.000	7.500.000	7.500.000	-7.500.000	0	
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.505.447.775	9.757.478.728	9.645.665.928	-9.859.781.847	-111.812.800	
a.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.003.475	35.001.738	35.001.738	-35.001.737	0	
b.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	810.000.000	702.500.000	277.500.000	-532.500.000	-425.000.000	pergeseran antar rekening
c.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	18.615.444.300	9.014.976.990	9.328.164.190	-9.287.280.110	313.187.200	
d.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0	
F.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	174.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	-	
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	-	
a.	Penyediaan Makanan	45.000.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-	
b.	Penyediaan Sandang	40.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
c.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	
d.	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	
e.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	
a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	pergeseran antar rekening

No	Bidang/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (+/-)		Ket
		Renja	APBD (Perbub I)		Renja	APBD (Perbub I)	
G.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79.400.000	66.000.000	72.000.000	7.400.000	6.000.000	
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.400.000	66.000.000	72.000.000	7.400.000	6.000.000	
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.400.000	66.000.000	72.000.000	7.400.000	6.000.000	pergeseran antar sub kegiatan

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2026, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja : Rp 27.425.181.444
2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) : Rp 17.702.308.111
3. Pagu Perubahan : Rp 18.162.689.671
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp-9.262.491.773
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD : 460.381.560

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya pergeseran antar sub kegiatan.
2. Adanya pergeseran antar rekening dan tambahan upah P3K gaji ke 13, gaji Desember.
3. Adanya penyesuaian target.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya pergeseran antar sub kegiatan.
2. Adanya pergeseran antar rekening dan tambahan upah P3K gaji ke 13, gaji Desember.
3. Adanya penyesuaian target.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.425.181.444	17.697.568.111				17.769.502.471	9.655.678.973	71.934.360		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					27.425.181.444	17.697.568.111				17.769.502.471	9.655.678.973	71.934.360		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Kab. Temanggung	100	%	5.202.202.669	5.883.208.383				6.010.142.743	- 807.940.074	126.934.360		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Kab. Temanggung	100	%	4.500.120.259	4.591.708.597				4.591.708.597	- 91.588.338	-		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	41	Orang/Bulan	4.500.120.259	4.591.708.597				4.591.708.597	- 91.588.338	-		
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	100	%	99.666.800	94.683.460				109.683.460	- 10.016.660	15.000.000	DAU	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	20	Paket	10.000.000	9.500.000		20		9.500.000	500.000	-	DAU	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Paket	15.000.000	14.250.000		12		14.250.000	750.000	-	DAU	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kab. Temanggung	12	Paket	10.000.000	9.500.000		12		9.500.000	500.000	-	DAU	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
						Penggandaan yang Disediakan													
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	36	Laporan	33.000.000	31.350.000		36		46.350.000	13.350.000	15.000.000	DAU	pergeseran antar sub kegiatan
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	25	Laporan	31.666.800	30.083.460		25		30.083.460	1.583.340	-	DAU	pergeseran antar sub kegiatan
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Urusan Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	100	%	376.467.840	1.000.965.945				1.082.900.305	- 706.432.465	81.934.360	DAU	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	6.000.000	5.700.000				5.700.000	300.000	-	DAU	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Laporan	76.350.000	72.532.500				72.532.500	3.817.500	-	DAU	
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	4	Laporan	9.000.000	8.550.000				18.550.000	- 9.550.000	10.000.000		pergeseran antar sub kegiatan
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	Laporan	285.117.840	914.183.445				986.117.805	- 700.999.965	71.934.360	DAU	pergeseran rekening dan tambahan upah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
																			P3K gaji ke 13, gaji Desember, 7193 4360
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Temanggung	100	%	225.947.770	195.850.381				225.850.381	97.389	30.000.000		
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	90	Unit	150.000.000	142.500.000				172.500.000	- 22.500.000	30.000.000		pergeseran antar sub kegiatan
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung	6	Unit	75.947.770	53.350.381				53.350.381	22.597.389	-		pergeseran antar rekening
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Kab. Temanggung	100	%	310.000.000	165.000.000				169.000.000	141.000.000	4.000.000		
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	Kab. Temanggung	100	%	5.000.000	-	Kab. Temanggung	100	%	-	5.000.000	-	DAU	
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	Kab. Temanggung	10	Dokumen	5.000.000	-	Kab. Temanggung	10	Dokumen	-	5.000.000	-	DAU	?

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
					Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pelatihan PSM dan fasilitasi program-program kegiatan PSM perekrutan anggota psm.	Kab. Temanggung	100	%	305.000.000	165.000.000	Kab. Temanggung	100	%	169.000.000	136.000.000	4.000.000	DAU	
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	6	Lembaga	235.000.000	150.000.000	Kab. Temanggung	28	lembaga	154.000.000	81.000.000	4.000.000	DAU	pergerakan antar sub kegiatan
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	30	Serifikat	10.000.000		Kab. Temanggung	10	Serifikat		10.000.000	-	DAU	
1	06	02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi		5	lembaga	15.000.000	5.000.000	0	26	lembaga	5.000.000	10.000.000	-		
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		50	orang	15.000.000	5.000.000		35	orang	5.000.000	10.000.000	-		pergerakan antar sub kegiatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		12	laporan	10.000.000	5.000.000		2400	laporan	5.000.000	5.000.000	-		
1	06	02	2.03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	-				-	20.000.000	-		
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Temanggung	100	%	12.000.000	7.500.000	Kab. Temanggung	100	%	7.500.000	4.500.000	-	DAU	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.	Kab. Temanggung	100	%	12.000.000	7.500.000	Kab. Temanggung	100	%	7.500.000	4.500.000	-	DAU	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	5	Orang	12.000.000	7.500.000	Kabupaten Temanggung	2	orang	7.500.000	4.500.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Kab. Temanggung	100	%	1.328.000.000	924.750.000				859.750.000	468.250.000	- 65.000.000		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Terpenuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kab. Temanggung	100	%	1.328.000.000	576.500.000				581.500.000	746.500.000	5.000.000		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
					serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	6	Orang	650.000.000	2.000.000	Kabupaten Temanggung	3	orang	2.000.000	648.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	130	Orang	20.000.000	5.000.000	Kabupaten Temanggung	34	orang	5.000.000	15.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	20	Orang	35.000.000	10.000.000	Kabupaten Temanggung	5	orang	10.000.000	25.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	4	Orang	15.000.000	5.000.000	Kabupaten Temanggung	3	orang	5.000.000	10.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	40	Orang	10.000.000	5.000.000	Kabupaten Temanggung	40	orang	10.000.000	-	5.000.000	DAU	pergeseran antar rekening
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Kab. Temanggung	75	Orang	25.000.000	25.000.000	Kabupaten Temanggung	55	orang	25.000.000	-	-	DAU	penyesuaian target dan pergeseran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
					Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													antar rekening
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	5	Orang	5.000.000	2.500.000	Kabupaten Temanggung	3	orang	2.500.000	2.500.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	100	Orang	10.000.000	8.000.000	Kabupaten Temanggung	100	orang	8.000.000	2.000.000	-	DAU	
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	90	Orang	528.000.000	504.000.000	Kabupaten Temanggung	81	orang	504.000.000	24.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	4	Orang	10.000.000	4.000.000	Kabupaten Temanggung	3	orang	4.000.000	6.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	20	Orang	15.000.000	5.000.000	Kabupaten Temanggung	5	orang	5.000.000	10.000.000	-	DAU	Penyesuaian Target
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	5	Orang	5.000.000	1.000.000	Kabupaten Temanggung	5	orang	1.000.000	4.000.000	-	DAU	Penyesuaian Anggaran

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (+/-)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlayannya Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Temanggung	100	%		348.250.000				278.250.000	278.250.000	- 70.000.000	DAU	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	240	Orang	-	348.250.000	Kabupaten Temanggung	240	orang	278.250.000	- 278.250.000	- 70.000.000	DAU	pergeseran antar sub kegiatan
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	Kab. Temanggung	100 48 65	%	20.319.578.775	10.564.109.728				10.564.109.728	9.755.469.047	-		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi Anak-anak Terlantar	Kab. Temanggung	100	%	814.131.000	806.631.000				806.631.000	z7.500.000	-		
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	321	Orang	799.131.000	799.131.000	Kabupaten Temanggung	267	anak	799.131.000	-	-	DAU	
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	15	Orang	15.000.000	7.500.000	Kabupaten Temanggung	15	anak	7.500.000	7.500.000	-		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kebutuhan Sosial bagi	Kab. Temanggung	100	%	19.505.447.775	9.757.478.728				9.757.478.728	9.747.969.047	-		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
						Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota													
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Temanggung	399832	Orang	70.003.475	35.001.738	Kab. Temanggung	4E+05	Orang	35.001.738	35.001.737	-	DAU	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	1165	orang	810.000.000	702.500.000	Kab. Temanggung	35 Perorangan, 5 KUBE	orang/ KUBE	702.500.000	107.500.000	-	DAU	pergeseran antar rekening
1	06	05	2.02	0005	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	34000	Keluarga	18.615.444.300	9.014.976.990	Kab. Temanggung	58494	Keluarga	9.014.976.990	9.600.467.310	-	DBH CHT	
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	73907	Keluarga	10.000.000	5.000.000	Kab. Temanggung	73907	Keluarga	5.000.000	5.000.000	-	DAU	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kab. Temanggung	100	%	174.000.000	87.000.000	Kab. Temanggung	100	%	87.000.000	87.000.000	-	DAU	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan kerentanan sosial	Kab. Temanggung	100	%	94.000.000	47.000.000	Kab. Temanggung	100	%	47.000.000	47.000.000	-	DAU	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Temanggung	100	Orang	45.000.000	22.500.000	Kab. Temanggung	100	Orang	22.500.000	22.500.000	-	DAU	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
						Kewenangan Kabupaten/Kota													
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	100	Orang	40.000.000	20.000.000	Kab. Temanggung	100	Orang	20.000.000	20.000.000	-	DAU	
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	400	Orang	3.000.000	1.500.000	Kab. Temanggung	400	Orang	1.500.000	1.500.000	-	DAU	
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	50	orang	2.000.000	1.000.000	Kab. Temanggung	50	orang	1.000.000	1.000.000	-	DAU	
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	1	Unit	4.000.000	2.000.000	Kab. Temanggung	1	Unit	2.000.000	2.000.000	-	DAU	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat pencegahan penanggulangan bencana	Kab. Temanggung	100	%	80.000.000	40.000.000	Kab. Temanggung	100	%	40.000.000	40.000.000	-		
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	60	orang	80.000.000	40.000.000	Kab. Temanggung	60	orang	40.000.000	40.000.000	-	DAU	pergeseran antar rekening

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Ket
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Kab. Temanggung	100	%	79.400.000	66.000.000				72.000.000	7.400.000	6.000.000		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kebutuhan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	100	%	79.400.000	66.000.000				72.000.000	7.400.000	6.000.000		
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	202	Makam	79.400.000	66.000.000	Kab. Temanggung	2	lokasi	72.000.000	7.400.000	6.000.000	DAU	pergeseran antar sub kegiatan

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2026

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

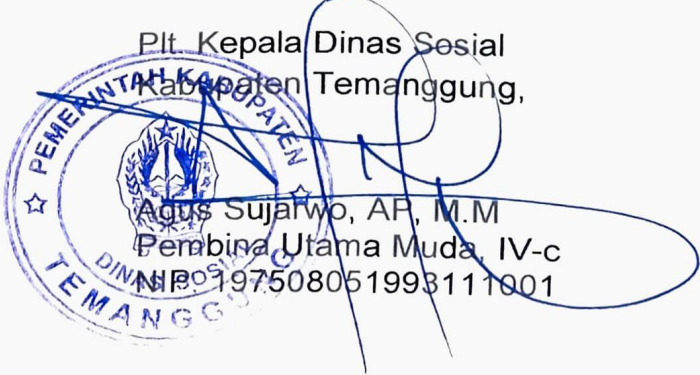
Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas Sosial terdiri dari 7 program 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 18.162.689.671. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 28 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung,

Agus Sujarwo, AP, M.M
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 197508051993111001